

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu	1. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Pemerintahan	2 Tugas dan 1 Laporan
	2. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Hukum dan Organisasi	1 Tugas
	3. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Perencanaan	1 Tugas

Program/Kegiatan	Anggaran (RP)
Bina Administrasi Kewilayahan	
1. Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	: 367,188,000
2. Monitoring dan Evaluasi terhadap Kerjasama yang dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	: 250,077,000
3. Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	: 555,220,000
4. Pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota	: 252,548,000
5. Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah	: 242,947,000
Total Anggaran	: 1,667,980,000

Jakarta, Februari 2020

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

.....
.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
 Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Meningkatkan Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu	1. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Keuangan	1 Tugas
	2. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Perencanaan	1 Tugas

Program/Kegiatan

Bina Administrasi Kewilayahan

Anggaran (RP)

- | | | |
|--|----------|--------------------|
| 1. Memberikan Rekomendasi atas Usulan DAK Kabupaten/Kota di Wilayahnya | : | 232,432,000 |
| 2. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota | : | 255,065,000 |
| Total Anggaran | : | 487,497,000 |

Jakarta, Februari 2020

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR JENDERAL
 BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,**

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA,**

**Dr. EKO SUBOWO, MBA
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19600321 198103 1 002**

.....

NIP.

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
 Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Meningkatnya Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu	1. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Pengawasan	1 Tugas

Program/Kegiatan

Bina Administrasi Kewilayahan

Anggaran (RP)

1. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya : 662,698,000

Total Anggaran : 662,698,000

Jakarta, Februari 2020

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

.....

NIP.

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
 Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Meningkatnya Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu	1. Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan PTSP	1 Tugas

Program/Kegiatan

Bina Administrasi Kewilayahan

Anggaran (RP)

1. Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	:	550,000,000
Total Anggaran	:	550,000,000

Jakarta, Februari 2020

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Dr. EKO SUBOWO, MBA
PEMBINA UTAMA
NIP. 19600321 198103 1 002

.....

NIP.